



## ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA MODAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PENGEMBANGAN MUTU GURU

Nadiya<sup>1</sup>, Eva Susanti<sup>2</sup>, Dedi Juanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

<sup>1</sup>nadiya@unmuha.ac.id

### Abstract

*This research was conducted at the UPTD Region I Teacher Quality Development Center (PPMG) of the Aceh Education Agency with the aim to find out how the system and procedures, recognition, recording and reporting of capital expenditures at the UPTD Region I Teacher Quality Development Center (PPMG) of the Aceh Education Agency. In analyzing the data this research was conducted with descriptive qualitative methods. The results of the study show that Recording and Reporting on Capital Expenditures at the UPTD Region I Teacher Quality Development Center (PPMG) Aceh Education Agency has implemented Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation No.64 of 2013 concerning Financial Management Guidelines Country / Region. The expenditure reporting carried out by the UPTD Region I Teacher Quality Development Center (PPMG) of the Aceh Education Agency has implemented PP No. 71 of 2010 concerning accrual-based recordings, which can be seen from the recording of expenditure accounts consisting of operating expenditures covering personnel expenditure and goods and services expenditure and capital expenditure which includes expenditure on equipment and machinery and expenditure on other fixed assets.*

*Keywords: recording and reporting on Capital Expenditures, personnel expenditure, goods expenditure, service expenditure*

### Abstrak

*Penelitian ini dilakukan pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur, pengakuan, pencatatan dan pelaporan belanja modal pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh. Dalam menganalisis data penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pencatatan dan Pelaporan atas Belanja Modal pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.*

*Kata Kunci: pencatatan dan pelaporan belanja modal, belanja individu, belanja barang, belanja jasa*

### PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan



yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa salah satu masalah dalam pendapatan dan belanja Pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh adalah masih lemahnya kemampuan pemerintah dalam menggali potensi pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah juga akan mempengaruhi belanja Pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh. Hal yang dinilai masyarakat dimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi belanja modal. Belanja modal Pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh antara lain berhubungan dengan masalah transportasi, orang, barang, dan jasa. Misalnya kualitas jalan (transportasi), perekonomian yang maju karena distribusi barang efisien jika sarana transportasi jalan memadai. Belanja modal juga berhubungan dengan bidang perhubungan melalui pembangunan jalan tol yang dapat meningkatkan perekonomian melalui akses jalan yang lebih efisien kepada masyarakat.

Prosedur pencatatan yang kurang tepat pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh dalam pelaporan belanja modal akan membuat pegawai Pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh kurang efektif dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, misalnya penerapan pencatatan dilakukan hanya sistem manual saja, maka hal ini akan membuat pekerjaan pegawai UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelaporan keuangan khususnya belanja modal. Berdasarkan teknologi saat ini pencatatan dan pelaporan belanja modal dapat dilakukan dengan sistem entry data, sistem ini akan sangat membantu pekerjaan pegawai UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh dalam pelaporan data belanja modal secara cepat, tepat dan efektif.



## TINJAUAN PUSTAKA

### Anggaran

Bastian (2012;191) menjelaskan bahwa anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Mardiasmo (2012;61) menjelaskan bahwa Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program dan aktivitas. Penganggaran (*budgeting*) adalah aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Wildavsky mengatakan *budgeting is translating financial resources into human purpose* maksudnya adalah penganggaran adalah penjabaran sumber daya keuangan untuk berbagai tujuan manusia.

Nordiawan (2012) menjelaskan bahwa konsep anggaran bagi sektor swasta dan sektor publik sama, terutama dalam hal pengalokasian sumber daya organisasi yang terbatas. Namun konsep ini berbeda jika dilihat dari teknis pelaksanaannya. Di sektor swasta indikator kerja yang menjadi pertanggungjawaban manajemen adalah keuntungan, sedangkan di sektor publik adalah efektivitas tujuan dari pemberian dan penggunaan dana yang diberikan. Bagi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Selain itu, proses anggaran di sektor publik juga memiliki muatan politis yang cukup signifikan sehingga menjadi proses penganggaran menjadi lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta.

### Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Secara Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Halim (2012:45) terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu *single entry* dan *double entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

Sistem ini disebut dengan sistem *double entry*. sistem pencatatan *double entry* inilah sering disebut akuntansi Sistem pencatatan *Double Entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, sehingga membentuk suatu perkiraan dalam sisi berlawanan yaitu sisi debit dan sisi kredit



secara perpasangan. Menurut Halim (2012:36), menyatakan bahwa menurut sistem pencatatan *double entry* pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Sehingga pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal, dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit dan dalam melakukan pencatatan tersebut setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

Dengan menggunakan *double entry* maka setiap transaksi yang terjadi akan dicatat pada akun yang tepat. karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross-check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit.

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak yang bersifat final. Proses pencatatan data akuntansi dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan tangan, memakai mesin pembukuan, atau dengan menggunakan komputer. Apabila pembukuan dilakukan dengan tangan atau memakai mesin pembukuan, maka data akuntansi akan dicatat dalam jurnal dan rekening (baik yang ada dalam buku besar maupun buku pembantu).

### **Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2013:105), Laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun laporan keuangan yang lazim dikenal adalah laba/rugi atau hasil usaha, neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan. Sedangkan Menurut Kasmir (2012:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau pada periode tertentu.

Menurut Munawir (2013:35), Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari kaitan atau hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Harahap (2013:190), Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.



## **Belanja Modal**

Menurut Mulyanto (2014:3), belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Sedangkan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

## **Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut (Anggani, 2015:55):

1. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
4. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Pada Pemerintahan Provinsi Aceh pembiayaan untuk kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta subsidi/ bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian halnya untuk memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari anggaran Pemerintahan Pusat dan sumber-sumber lain yang sah merupakan Barang Milik Negara.



### Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Afandi (2015) dengan judul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkan laporan keuangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan salah satu entitas pemerintah yang menyajikan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan keuangan pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan teknik wawancara, teknik studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan proses pencatatan akuntansi, serta pelaporannya telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Pada tahun anggaran berikutnya, sebaiknya pimpinan UPTD Metrologi terus mempertahankan penyajian laporan keuangan sesuai amanat PP yang berlaku dengan transparan dan tepat waktu sehingga dapat dipergunakan bagi pengguna laporan guna pengambilan keputusan.

Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sitepu (2015) dengan judul penelitian Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terdapat penyajian akumulasi penyusutan dalam pelaporannya. Sebaiknya untuk tahun-tahun berikutnya, Ditjen Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar Pengelolaan Keuangan dapat berwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Sabijono (2016) juga melakukan penelitian dengan judul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan informasi mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis



pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 tahun 2010. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Bendahara Pengeluaran khususnya tahun anggaran 2015 dimana format dan uraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diharapkan perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD serta meningkatkan sumber daya yang ada lewat pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

Penelitian yang selanjut dilakukan oleh Karamoy (2016) dengan judul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan hanya membahas mengenai belanja modal . Tujuan dari Penelitian ini adalah bagaimanakah Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal dengan baik atau tidak (sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terdapat penyajian akumulasi penyusutan dalam pelaporannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian dan pengamatan langsung pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh yang beralamat jalan Geuchik H. Abd Jalil No. 1 Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Sedangkan objek penelitian ini adalah pencatatan dan pelaporan belanja modal pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh.

## Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana setelah data dikumpulkan, dianalisa dan diolah untuk memberikan gambaran dan uraian yang wajar mengenai keadaan objek penelitian, dalam hal ini adalah semua yang berhubungan dengan laporan realisasi anggaran UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pencatatan Belanja Modal Pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Tahap pertama yang akan dilakukan dalam pembuatan laporan keuangan yaitu melakukan pencatatan (penjurnalan) transaksi mulai dari awal hingga akhir periode tahun anggaran. Dalam PP No 71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu Jurnal Anggaran yang merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional serta Jurnal Finansial yang merupakan jurnal untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Berdasarkan pencatatan yang telah dipaparkan berdasarkan beberapa transaksi, dapat dilihat bahwa pencatatan dalam Jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran yang dilakukan oleh UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.



### **Analisis Pelaporan Belanja Modal Pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Mengenai pelaporan pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan



Aceh dalam laporan realisasi anggaran serta pencatatan dan pelaporan dalam buku kas umum akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
3. Pada Laporan Realisasi Anggaran UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh, belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal.
4. Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja Barang.
5. Belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, serta belanja aset tetap lainnya.
6. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.
7. Penggunaan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali.
8. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan (debit).
9. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran (kredit).

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang penulis kemukakan dalam babsebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaiberikut:

1. Pencatatan dan Pelaporan atas Belanja Modal pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
2. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri

atas belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa dan belanja modal yang meliputi meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.

### Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran antara lain :

1. Meningkatkan anggaran belanja modal yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing seperti anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal lainnya
2. Dalam melakukan pencacatan dan pelaporan harus sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi agar tidak terjadi kesalahan pada saat mengimput data
3. Meningkatkan kemampuan aparatur UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh yaitu dengan mengadakan pelatihan kerja agar dapat membuat pencatatan dan pelaporan yang efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dhullo (2015) Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA
- Angraini, Dewi (2015) Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Pariaman (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan). Jurnal KBP
- Ayuningtyas, Hertianti. (2012). Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3, Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Kusufi Syam. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2013) Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karamoy, Heman (2016) Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
- Karinda, Chrisman. Y. (2015). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Akuntansi
- Kasmir, S.E, M.M (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Pers.
- Kolinug, M.S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas SamRatulangi. Manado.
- Mardiasmo. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Munawir, S. (2013). Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Nafarin, M. (2012). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

- 
- Nordiawan, (2012). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah RI, Undang-Undang No 24.(2004).Perbendaharaan Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.(2006). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71.(2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Sabijono, Harijanto (2016) Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Jurnal EMBA
- Sitepu, Estaphany. G. (2015) Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Syafitri, Lili (2012) Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Ilmiah STIE MDP